

## **DARI NETRALITAS KE ALIANSI: KEPENTINGAN NASIONAL SWEDIA BERGABUNG DENGAN NATO TAHUN 2022–2024**

**Tri Nandasari Rahmawati Aulia Sutrisno Putri<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

*This article examines Sweden's national interests in applying for and realizing membership in the North Atlantic Treaty Organization (NATO) during the period 2022–2024, a decision that marks a fundamental shift from the tradition of neutrality maintained for nearly two centuries. Using a qualitative approach based on literature review, this study employs the neorealist theoretical framework of Kenneth Waltz reinforced by the concepts of balance of power, national security, alliances, foreign policy, national interest, and international security. The results show that Sweden's decision to join NATO was driven by two main external factors: first, Russia's increasing aggressiveness disproportionate to its military capability; and second, the European Union's defense limitations dependent on United States military power through NATO. Sweden's manifested national interests encompass four dimensions: military interests in collective security guarantees and deterrence effects through NATO Article 5; security interests in sovereignty protection and defense interoperability; economic interests in integrating national defense industries into the alliance market; and political interests in enhancing negotiating position and diplomatic influence in the Euro-Atlantic security architecture. This study confirms that Sweden's foreign policy transformation is a rational response to structural changes in the international system.*

*Keywords: National Interest, NATO, Neorealism, European Security, Sweden.*

### **ABSTRAK**

*Artikel ini mengkaji kepentingan nasional Swedia dalam mengajukan dan merealisasikan keanggotaan North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada periode 2022–2024, sebuah keputusan yang menandai perubahan fundamental dari tradisi netralitas yang telah dipertahankan selama hampir dua abad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menerapkan kerangka teori neorealisme Kenneth Waltz yang diperkuat oleh konsep balance of power, keamanan nasional, aliansi, kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, dan keamanan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Swedia bergabung dengan NATO didorong oleh dua faktor utama eksternal: pertama, meningkatnya agresivitas Rusia yang tidak sebanding dengan kapabilitas militernya; dan kedua, keterbatasan pertahanan Uni Eropa yang bergantung pada kekuatan militer Amerika Serikat melalui NATO. Adapun kepentingan nasional Swedia yang termanifestasi mencakup empat dimensi, yaitu kepentingan militer berupa jaminan keamanan kolektif dan efek deterrence melalui Pasal 5 NATO; kepentingan keamanan berupa perlindungan kedaulatan dan interoperabilitas pertahanan; kepentingan ekonomi berupa integrasi industri pertahanan nasional ke pasar aliansi; serta kepentingan politik berupa peningkatan posisi tawar dan pengaruh diplomatik dalam arsitektur keamanan Euro-Atlantik. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan luar negeri Swedia merupakan respons rasional terhadap perubahan struktural sistem internasional.*

*Kata Kunci: Kepentingan Nasional, NATO, Neorealisme, Keamanan Eropa, Swedia.*

## **PENDAHULUAN**

Swedia dikenal sebagai negara yang secara historis mengadopsi kebijakan non-blok dalam politik luar negerinya. Selama lebih dari dua abad, Swedia mempertahankan netralitasnya dalam berbagai konflik global dan regional sejak deklarasi Pangeran Charles XIV pada tahun 1834. Netralitas tersebut dipertahankan melewati berbagai ujian sejarah, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, hingga Perang Dingin, meski selalu disertai dengan berbagai kompromi strategis yang bersifat pragmatis.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Ukraina dalam apa yang disebut Presiden Vladimir Putin sebagai "Operasi Militer Khusus." Peristiwa ini secara fundamental mengubah kalkulasi keamanan negara-negara Eropa, termasuk Swedia. Dalam waktu kurang dari tiga bulan pasca invasi, Swedia bersama Finlandia mengajukan permohonan keanggotaan NATO kepada Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg pada 18 Mei 2022. Proses akses resmi Swedia kemudian rampung pada tahun 2024, menjadikannya anggota ke-32 aliansi tersebut.

Keputusan ini memiliki urgensi kajian yang tinggi karena bertentangan dengan posisi tradisional Swedia yang menerapkan prinsip netralitas selama hampir dua abad. Sementara NATO merupakan aliansi pertahanan militer yang beranggotakan kompetitor-kompetitor utama Rusia dalam politik internasional, bergabungnya Swedia berarti mengakhiri era netralitas dan memulai era keberpihakan strategis yang membawa implikasi keamanan baru. Rumusan masalah yang menjadi inti kajian ini adalah: apa kepentingan nasional Swedia bergabung dengan NATO pada tahun 2022–2024?

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis kepentingan nasional Swedia yang melatarbelakangi keputusan bergabung dengan NATO, baik dari dimensi faktor pendorong eksternal maupun manifestasi kepentingan nasional itu sendiri. Secara teoritis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman mengenai dinamika perubahan kebijakan keamanan negara netral dalam konteks perubahan struktur sistem internasional.

## **KERANGKA ANALITIK**

Penelitian ini dibangun di atas fondasi teori neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz dalam karyanya *Theory of International Politics*. Neorealisme berangkat dari premis bahwa struktur sistem internasional yang bersifat anarki—yakni ketiadaan otoritas sentral di atas negara—mendorong negara-negara untuk bertindak demi mengamankan kepentingan nasional mereka. Berbeda dari realisme klasik yang berpusat pada sifat dasar manusia, neorealisme menempatkan struktur sistem sebagai variabel penjelas utama perilaku negara. Dalam pandangan Waltz, distribusi kapabilitas di antara unit-unit negara dalam sistem internasional menentukan corak interaksi dan pilihan kebijakan mereka.

Konsep *balance of power* menjadi turunan penting dari neorealisme dalam artikel ini. *Balance of power* adalah mekanisme yang berjalan untuk mencegah dominasi satu aktor tunggal dalam sistem internasional. Perwujudan *balancing* dapat berbentuk *hard balancing*—yaitu strategi memperkuat kapabilitas militer dan membangun aliansi formal—maupun *soft balancing* melalui peningkatan kapasitas senjata dan kerja sama institusional. Bergabungnya Swedia ke NATO dapat dikategorikan sebagai bentuk *hard balancing* untuk mengimbangi potensi ancaman dari Rusia.

Konsep keamanan nasional dari Barry Buzan dan Lene Hansen digunakan untuk memahami bahwa ancaman tidak hanya bersumber dari luar negeri, tetapi juga dapat bersifat multisektoral, mencakup dimensi militer, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam penelitian ini, sektor militer menjadi fokus utama mengingat relevansinya dengan dinamika ancaman Rusia. Konsep aliansi dari Stephen M. Walt menjelaskan bahwa aliansi dapat bertahan ketika terdapat faktor kepemimpinan hegemonik, pemeliharaan kredibilitas, solidaritas ideologis, dan pelembagaan yang kuat—semua faktor ini ditemukan dalam NATO.

Konsep kepentingan nasional dari Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara lain. Kepentingan nasional mencakup keamanan, kesejahteraan, dan pemeliharaan power dalam sistem internasional. Kerangka konsep ini secara keseluruhan digunakan untuk menganalisis kalkulasi kepentingan Swedia dalam konteks perubahan lingkungan keamanan Eropa pasca invasi Rusia ke Ukraina.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan membangun pemahaman mendalam mengenai fenomena perubahan kebijakan luar negeri Swedia yang bersifat kompleks dan kontekstual. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kejadian-kejadian berdasarkan data yang terkumpul, sementara dimensi analitis diterapkan untuk mengkaitkan fakta empiris dengan kerangka teori yang digunakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yakni pengumpulan data sekunder melalui literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah dan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan yang relevan. Sumber-sumber utama meliputi publikasi NATO, dokumen resmi Pemerintah Swedia, laporan SIPRI, OHCHR, dan berbagai jurnal hubungan internasional.

Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data untuk memilah dan memfokuskan informasi yang relevan; penyajian data secara naratif yang tersusun dan mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta peningkatan ketekunan dalam menelaah berbagai referensi yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Kebijakan Luar Negeri Swedia sebagai Negara Netral**

Netralitas Swedia pertama kali dideklarasikan oleh Pangeran Charles XIV pada tahun 1834 sebagai respons atas kekalahan dalam Perang Napoleon dan hilangnya wilayah Finlandia kepada Rusia. Deklarasi ini mengubah karakter kebijakan luar negeri Swedia dari yang sebelumnya ekspansionis menjadi non-intervensionis. Secara strategis, netralitas berfungsi menjadikan wilayah Swedia sebagai buffer zone di antara kekuatan-kekuatan besar Eropa, khususnya dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan Inggris Raya dan Rusia.

Implementasi prinsip netralitas dalam dua perang dunia tidak pernah bersifat absolut. Pada Perang Dunia II, Swedia terpaksa menandatangani perjanjian transit dengan Jerman pada tahun 1940, mengizinkan sekitar 250.000 tentara Jerman melintasi wilayahnya hingga tahun 1943. Keputusan ini lahir dari posisi tawar Swedia yang lemah di hadapan Jerman yang sedang menduduki Norwegia dan Denmark. Setelah posisi Jerman melemah, Swedia segera mencabut perjanjian transit tersebut dan berbalik mendekati diri kepada Sekutu melalui Perjanjian Sekutu-Swedia pada September 1943.

Pada masa Perang Dingin, Swedia memilih tidak bergabung dengan NATO maupun Pakta Warsawa, meski tetap menjaga kedekatan ekonomi dengan Barat. Pada tahun 1995, Swedia bergabung dengan Uni Eropa, dan sejak 1994 mulai berpartisipasi dalam program Partnership for Peace (PfP) NATO. Menurut Malmberg, kebijakan luar negeri Swedia pada periode ini memiliki empat elemen: prinsip netralitas, kerja sama Nordik, komitmen terhadap PBB, dan asosiasi dengan mekanisme keamanan Eropa. Dengan demikian, netralitas Swedia selalu berdampingan dengan keterbukaan terhadap kerja sama internasional yang tidak mengancam posisi non-bloknya.

### **Dinamika Keamanan Eropa dan Agresivitas Rusia**

Pasca Perang Dingin, dinamika keamanan Eropa tidak lagi ditandai oleh konfrontasi militer berskala besar antar blok, melainkan oleh serangkaian konflik regional yang semakin mengungkap pola agresivitas Rusia di kawasan. Sengketa Pulau Tuzla antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2003 memperlihatkan kecenderungan Rusia menggunakan coercive diplomacy untuk menguji kedaulatan negara-negara tetangganya. Pola ini berkembang lebih terbuka pada Perang Rusia-Georgia tahun 2008, di mana untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dingin, Rusia secara langsung menggunakan kekuatan militer konvensional terhadap negara berdaulat di Eropa.

Aneksasi Krimea pada tahun 2014 dan intervensi militer di Donbas semakin memperkuat persepsi ancaman di kalangan negara-negara Eropa. Rusia mengerahkan sekitar 20.000 tentara ke Krimea selama proses aneksasi, sementara negara-negara Barat merespons dengan sanksi berkepanjangan sejak tahun 2014. Namun respons berupa kecaman dan sanksi tersebut tidak mampu membendung agresivitas Rusia, sebagaimana terbukti ketika invasi besar-besaran ke Ukraina dilancarkan pada 24 Februari 2022. Invasi yang melibatkan lebih dari 127.000 tentara ini tidak hanya mengubah status quo teritorial, tetapi juga secara fundamental mengubah lanskap keamanan seluruh kawasan Eropa.

Dampak invasi Rusia bersifat multidimensional. Menurut laporan OHCHR periode Agustus 2022 hingga Januari 2023, setidaknya 5.987 korban sipil tewas di Ukraina. Data UNHCR per Maret 2022 mencatat lebih dari delapan juta pengungsi keluar dari Ukraina, termasuk sekitar 50.000 yang masuk ke Swedia. Dampak ekonomi juga signifikan: pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan Asia Tengah anjlok dari 7,8 persen pada 2021 menjadi 2,2 persen pada 2022, sementara inflasi Swedia sendiri mencapai sekitar 10 persen di akhir 2022. Persepsi ancaman yang dihasilkan oleh kombinasi faktor keamanan dan ekonomi inilah yang mendorong pemerintah Swedia untuk mengevaluasi kembali posisi pertahanannya secara fundamental.

### **Faktor-Faktor Pendorong Swedia Bergabung dengan NATO**

Dalam kerangka neorealisme, analisis bermula dari evaluasi systemic incentive—faktor eksternal dalam sistem internasional yang mempengaruhi pilihan kebijakan suatu negara. Dalam konteks pengajuan keanggotaan NATO oleh Swedia, terdapat dua systemic incentive utama yang saling berkaitan.

Pertama, inkonsistensi antara agresivitas Rusia dan kapabilitas militernya. Meskipun perilaku Rusia semakin agresif sejak awal abad ke-21, kapabilitas militernya secara objektif tidak lebih kuat dari era Uni Soviet. Pengeluaran militer Uni Soviet pernah mendekati USD 500 miliar pada puncak Perang Dingin dan sempat melebihi AS pada periode 1973–1980. Sebaliknya, sejak tahun 1991 hingga 2013, pengeluaran militer Rusia tidak pernah mencapai USD 100 miliar, jauh tertinggal dari AS yang rata-rata di atas USD 400 miliar pada periode yang sama. Dengan demikian, Rusia dianggap sebagai ancaman oleh Swedia namun kapabilitas militernya tidak cukup kompetitif dengan kekuatan pertahanan AS melalui NATO—yang menjadikan pilihan bergabung dengan NATO sebagai kalkulasi yang rasional dan terukur.

Kedua, keterbatasan kapabilitas pertahanan Uni Eropa. Meskipun Swedia telah menjadi anggota EU sejak 1995 dan EU memiliki kerangka Common Security and Defence Policy (CSDP), kapabilitas pertahanan kolektif EU terbukti tidak memadai. Baik EU Battle Group (sekitar 1.000 pasukan) maupun Eurocorps (2.500 pasukan) tidak memiliki komando militer yang tetap dan bersifat sukarela serta ad hoc. Pengeluaran pertahanan negara-negara besar EU pada tahun 2022 tidak lebih dari 2,5 persen total pengeluaran pertahanan dunia masing-masing, jauh dari 39 persen yang dimiliki AS. Ketergantungan EU pada AS melalui NATO dalam hal pertahanan kolektif ini menegaskan bahwa keanggotaan EU saja tidak cukup menjamin keamanan Swedia—sehingga keanggotaan NATO menjadi pilihan yang lebih substantif.

Dimensi domestik juga memainkan peran krusial. Perdana Menteri Magdalena Andersson, yang menjabat sejak 30 November 2021 hingga September 2022, pada awal pemerintahannya masih berkomitmen pada posisi netral. Dalam pidatonya 30 November 2021, beliau secara eksplisit menyatakan: "Our non-participation in military alliances serves our country well and contributes to stability and security in northern Europe." Namun, invasi Rusia ke Ukraina mengubah kalkulasinya secara dramatis. Dalam debat khusus di Riksdag pada 16 Mei 2022, Andersson menyatakan bahwa Swedia memerlukan jaminan keamanan formal melalui keanggotaan NATO, menegaskan bahwa EU tidak cukup untuk menjamin pertahanan kawasan. Perubahan persepsi pemimpin ini, yang didukung oleh mayoritas Riksdag, menjadi variabel domestik penentu yang mengakselerasi proses pengajuan keanggotaan.

### **Proses Pengajuan dan Akses Keanggotaan NATO**

Proses pengajuan keanggotaan Swedia berlangsung melalui serangkaian tahapan diplomatik yang kompleks. Satu hari setelah invasi Rusia ke Ukraina (25 Februari 2022), Swedia segera meningkatkan kerja sama dengan NATO melalui penandatanganan Modalities for Strengthened Interaction (MSI). Pada 16 Maret 2022, Pemerintah Swedia membuka

diskusi kebijakan keamanan dengan Riksdag yang dipimpin Menteri Luar Negeri Ann Linde bersama Kementerian Pertahanan Peter Hultqvist.

Laporan hasil diskusi yang dirilis 13 Mei 2022 secara tegas menyatakan bahwa invasi Rusia merupakan ancaman bagi Swedia, dan pengajuan keanggotaan NATO dipandang sebagai satu-satunya solusi. Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah Swedia memutuskan mengajukan keanggotaan NATO pada 16 Mei 2022. Dua hari kemudian, 18 Mei 2022, Swedia bersama Finlandia secara resmi menyerahkan surat permohonan kepada Sekretaris Jenderal NATO di Brussel.

Proses aksesinya tidak berlangsung mulus. Turki mengajukan keberatan terkait isu terorisme PKK, sehingga diperlukan negosiasi trilateral antara Turki, Swedia, dan Finlandia yang menghasilkan perjanjian pada 28 Juni 2022 di Madrid. Dalam perjanjian tersebut, Swedia dan Finlandia sepakat mengidentifikasi PKK sebagai organisasi teroris dan tidak memberlakukan embargo senjata terhadap Turki. Protokol Aksesinya kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota NATO pada 5 Juli 2022 dan mulai diratifikasi. Proses ratifikasi yang memerlukan persetujuan semua anggota NATO ini akhirnya rampung pada tahun 2024, menjadikan Swedia anggota resmi aliansi tersebut.

### **Kepentingan Nasional Swedia dalam Keanggotaan NATO**

Menggunakan parameter *relative material power* dalam neorealisme, Swedia memiliki kecukupan ekonomi namun kapabilitas militer yang tidak kompetitif terhadap Rusia. PDB Swedia mencapai USD 55.689,4 per kapita pada tahun 2022, menempatkannya di urutan ke-11 dunia. Namun pengeluaran militer Swedia pada 2021 hanya sekitar USD 6 miliar (posisi ke-32 dunia), jauh di bawah Rusia yang mencapai USD 292 miliar dan AS yang USD 877 miliar. Postur pertahanan Swedia pada 2019 terdiri dari 66.000 personel aktif, 4 kapal selam, 150 pesawat tempur, dan 120 tank—jauh tidak sebanding dengan postur Rusia. Ketidakseimbangan kapabilitas ini menjadi basis rasional keputusan bergabung dengan NATO.

Kepentingan militer merupakan dimensi kepentingan nasional yang paling mendasar. Bergabung dengan NATO memberikan Swedia jaminan keamanan kolektif melalui Pasal 5 Traktat Atlantik Utara yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota merupakan serangan terhadap seluruh aliansi. Mekanisme ini menciptakan efek *deterrence* yang signifikan terhadap potensi agresi Rusia. Selain itu, posisi geografis Swedia yang strategis di kawasan Laut Baltik menjadikannya aktor kunci dalam sistem pertahanan NATO di wilayah tersebut. Integrasi kekuatan militer Swedia ke dalam komando dan struktur pertahanan kolektif NATO, termasuk *Supreme Allied Commander Europe (SACEUR)*, secara signifikan meningkatkan efektivitas proyeksi kekuatan militer Swedia. Dalam kerangka *balance of power*, Swedia bukan sekadar pihak yang dilindungi, tetapi kontributor aktif dalam penyeimbangan kekuatan terhadap Rusia di kawasan Baltik dan Arktik.

Kepentingan keamanan berkaitan erat dengan tujuan *state survival* dalam neorealisme. Ancaman Rusia yang semakin agresif menciptakan defisit keamanan serius di kawasan Eropa Utara. NATO berfungsi sebagai *force multiplier* bagi Swedia, memberikan akses pada jaringan intelijen bersama, sistem pertahanan udara terintegrasi, dan latihan militer bersama yang meningkatkan interoperabilitas. Keanggotaan NATO juga memungkinkan Swedia

mengakses teknologi militer canggih, termasuk dalam bidang pertahanan siber yang semakin relevan dalam era konflik kontemporer. Dengan demikian, Swedia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kemampuan nasionalnya sendiri, melainkan pada jaringan keamanan kolektif yang jauh lebih kuat.

Kepentingan ekonomi, meski bukan pendorong utama, tetap signifikan. Swedia memiliki industri pertahanan yang maju, ditandai oleh keberadaan perusahaan seperti Saab yang memproduksi pesawat tempur, radar, dan sistem senjata canggih. Keanggotaan NATO membuka akses yang lebih luas ke pasar alutsista negara-negara aliansi dan meningkatkan peluang kontrak pertahanan jangka panjang. Lebih jauh, lingkungan keamanan yang lebih stabil sebagai hasil keanggotaan NATO meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya tarik Swedia sebagai pusat industri teknologi tinggi. Komitmen NATO terhadap target anggaran pertahanan 2 persen dari PDB juga berarti peningkatan belanja militer domestik yang secara tidak langsung mendorong pertumbuhan sektor industri pertahanan nasional.

Kepentingan politik merupakan dimensi yang tidak kalah penting. Dengan bergabung ke NATO, Swedia secara tegas memosisikan dirinya dalam komunitas negara-negara demokrasi liberal Barat. Ini meningkatkan posisi tawar Swedia dalam perumusan kebijakan keamanan Eropa dan memberikannya peran lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat regional maupun global. Berbeda dari sebelumnya ketika Swedia hanya berstatus mitra, keanggotaan penuh NATO memungkinkan Swedia mempengaruhi arah kebijakan keamanan kolektif dari dalam. Bergabungnya Swedia dan Finlandia juga menjadikan kawasan Nordik terintegrasi sepenuhnya dalam struktur pertahanan NATO, memperkuat stabilitas regional sekaligus meningkatkan relevansi geopolitik Swedia.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan bergabung dengan NATO tidak bertentangan dengan identitas historis Swedia sebagai *peace-oriented state*. Dalam perspektif neorealisme, tindakan ini merupakan bentuk adaptasi rasional terhadap perubahan distribusi kekuatan di kawasan Eropa. Melalui kerangka *balance of power*, langkah Swedia dikategorikan sebagai *hard balancing*—memperkuat posisi keamanan melalui aliansi formal—namun tetap dibingkai dalam narasi menjaga perdamaian kawasan dan mencegah eskalasi konflik. Dengan demikian, kepentingan nasional Swedia dalam NATO mencakup tidak hanya peningkatan kapabilitas militer, tetapi juga perlindungan nilai-nilai fundamental seperti demokrasi, kesetaraan, dan komitmen terhadap perdamaian internasional.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan Swedia mengajukan dan merealisasikan akses keanggotaan NATO pada periode 2022–2024 merupakan perubahan kebijakan keamanan yang signifikan, yang didorong oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik dalam kerangka neorealisme. Secara eksternal, dua *systemic incentive* utama adalah: inkonsistensi antara agresivitas Rusia yang meningkat dan kapabilitas militernya yang relatif terbatas dibanding AS dan NATO; serta keterbatasan kapabilitas pertahanan kolektif Uni Eropa yang menjadikannya tidak cukup memadai sebagai jaminan keamanan bagi Swedia.

Kepentingan nasional Swedia yang termanifestasi dalam keanggotaan NATO mencakup empat dimensi: (a) kepentingan militer, berupa jaminan keamanan kolektif melalui Pasal 5 NATO dan efek *deterrence* terhadap potensi agresi Rusia; (b) kepentingan

keamanan, berupa peningkatan kapasitas pertahanan melalui interoperabilitas, intelijen bersama, dan akses teknologi militer canggih; (c) kepentingan ekonomi, berupa integrasi industri pertahanan nasional ke pasar aliansi dan stabilitas lingkungan yang mendorong kepercayaan investor; serta (d) kepentingan politik, berupa penguatan posisi tawar dan pengaruh diplomatik dalam arsitektur keamanan Euro-Atlantik.

Proses aksesinya mencerminkan kompleksitas diplomasi multilateral, termasuk negosiasi trilateral dengan Turki untuk mengatasi isu terorisme PKK dan proses ratifikasi yang panjang dari seluruh anggota NATO. Keanggotaan penuh Swedia dalam NATO menjadi bagian dari transformasi kawasan Nordik yang kini terintegrasi sepenuhnya dalam struktur pertahanan Barat. Temuan ini mengonfirmasi tesis neorealisme bahwa perubahan distribusi kekuatan dalam sistem internasional—khususnya agresivitas aktor besar—mendorong negara-negara yang lebih kecil untuk membentuk atau bergabung dengan aliansi sebagai strategi survival yang rasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2022). 'No Other Option': Excerpts of Putin's Speech Declaring War. Al Jazeera News.
- Al Jazeera. (2022). Russian Forces Launch Full-Scale Invasion of Ukraine. Al Jazeera.
- Al Jazeera. (2014). Timeline: Ukraine's Political Crisis. Al Jazeera News.
- Brunet-Jailly, E. (2015). Russia-Ukraine: The Tuzla Sand Bar. In *Border Disputes: A Global Encyclopedia*. ABC-CLIO.
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge University Press.
- Buzan, B., Waeber, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. WHEATSEAF BOOK.
- Donnelly, J. (2004). *Realism and International Relations*. Cambridge University Press.
- Gilmour, J. (2011). *Trading with Germany and the Allies: Blackmail and Brinkmanship. In Sweden, the Swastika, and Stalin*. Edinburgh University Press.
- Government Offices of Sweden. (2022). *A Deteriorating Security Policy Situation: Consequences for Sweden*.
- Government Offices of Sweden. (2023). *Sweden's Path to NATO Membership*.
- Gstöhl, S. (2002). *Reluctant Europeans: Norway, Sweden, and Switzerland in the Process of Integration*. Lynne Rienner Publishers.
- Gustavsson, J. (1998). *Explaining the Swedish Reorientation on EC Membership. In The Politics of Foreign Policy Change*. Lund University Press.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Kaplan, L. S. (1984). *The United States and NATO: The Formative Years*. University Press of Kentucky.

- Karonen, P. (2010). *The Peace Treaty of Fredrikshamn and Its Aftermath in Sweden and Finland*. Septentrio Academic Publishing.
- Killham, E. L. (1993). *The Nordic Way: A Path to Baltic Equilibrium*. The Compass Press.
- Lundqvist, S. (2022). A convincing Finnish move: Implications for state identity of persuading Sweden to jointly bid for NATO membership. *Studia Europejskie*, 26(4), 73–110.
- Malmborg, M. af. (2001). *Neutrality and State Building in Sweden*. Palgrave Macmillan.
- Miller, S. E. (2017). *International Security*, 42(3), 3–6. JSTOR.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Müller, L. (2019). *Neutrality in World History*. Routledge.
- NATO. (2023). *Finland and Sweden Complete NATO Accession Talks*. NATO News.
- NATO. (2023). *NATO Mission Iraq*. NATO What We Do.
- NATO. (2022). *The NATO Science for Peace and Security*.
- NATO Parliamentary Assembly. (2023). *Ratification of Finland and Sweden's Accession to NATO*.
- OHCHR. (2023). *Report on the Human Rights Situation in Ukraine 1 August 2022–31 January 2023*. United Nations.
- Reuters. (2022). *Swedish Government Warns of Slowdown as Ukraine War, Inflation Hit Economy*.
- SIPRI. (2023). *Trends in World Military Expenditure 2022*.
- Statista. (2023). *The 20 Countries with the Largest Gross Domestic Product (GDP) per Capita in 2022*.
- Sveriges Riksdag. (2022). *Protokoll 2021/22*.
- Tharoor, I. (2022). *Russia Pushes the Panic Button and Raises Risk of Nuclear War*.
- Trilateral Memorandum between Turkey, Finland and Sweden. (2022). Madrid, Spain.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill.
- Walt, S. M. (1997). Why Alliances Endure or Collapse. *Survival*, 39(1), 158–162.
- Westberg, J. (2015). *Svenska Säkerhetsstrategier [Swedish Security Strategies]*. Studentlitteratur.
- Wieslander, A. (2019). What makes an ally? Sweden and Finland as NATO's closest partners. *Journal of Transatlantic Studies*, 17, 194–222.
- Wieslander, A. (2022). The Hultqvist doctrine: Swedish security and defence policy after the Russian annexation of Crimea. *Defence Studies*, 22(1), 35–59.
- Wahlbäck, K. (1986). *The Roots of Swedish Neutrality*. The Swedish Institute.